

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Australia merupakan benua yang berbentuk pulau yang terletak diantara samudra Hindia dan Pasifik dan diapit oleh kepulauan Asia Tenggara dan daratan Kutub Selatan. Australia juga merupakan sebuah negara monarkhi konstitusional serta mempunyai sistem pemerintahan parlementer. Secara geografis Australia satunya tetangga terdekat Papua New Guinea dan Timor-Timur. Jika Australia dan negara tetangga seperti Indonesia dapat membangun hubungan dengan baik maka kedua negara akan dapat menstabilkan kawasan. Perbedaan budaya dan kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri kedua negara sangat mempengaruhi hubungan kedua belah pihak.

Australia adalah sebuah regenerasi dalam menciptakan beberapa politisi ulung dan handal, hal tersebut sudah merupakan hal yang biasa. Partai buruh merupakan salah satu partai politik yang besar di Australia yang selalu berusaha mencetak partai politisi tersebut.¹ Australia juga memakai paham demokrasi yang didasarkan atas pemilihan umum, maka Australia adalah salah satu dari sejumlah kecil negara di

¹ Zulkifli Hamid, *Sistem Politik Australia*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 1999, hlm.188.

dunia ini yang rakyatnya diwajibkan untuk menggunakan hak-hak demokrasi mereka, cara pemilihan adalah preferential.²

Timor-Timur selalu membuat Indonesia bingung, terutama sejak Indonesia menggabungkan Timor-Timur sebagai propinsi ke-27 Republik Indonesia, pada tahun 1976. Akan tetapi soal Timor-Timur menimbulkan ketegangan antara Australia dan Indonesia, jauh sebelum Timor-Timur bergabung dengan Indonesia. Ada banyak peristiwa yang menyoroti perbedaan pendapat antara Australia dan Indonesia berkenaan dengan soal Timor-Timur. Misalnya, integrasi Timor-Timur ke dalam Republik Indonesia, kematian lima (5) wartawan Australia yang dianggap tidak wajar, Laporan Dunn, artikel di koran *Sydney Morning Herald* (yang ditulis oleh Peter Jenkins), dan akhirnya Insiden Dili.

Hubungan Australia-Indonesia selama ini pada umumnya berlangsung cukup baik walaupun sering mengalami pasang surut akibat adanya perbedaan persepsi mengenai berbagai masalah serta sikap negatif media massa dan kalangan tertentu Australia terhadap Indonesia. Perbedaan-perbedaan ini sering disebut sebagai perbedaan nilai dan sering menyebabkan pertenturan antara kedua negara,

² Dalam sistem pemilihan preferential: para pemilih diharuskan mencatumkan nomor urut disamping nama setiap calon sesuai dengan urutan pilihan masing-masing. Jumlah suara dengan pilihan pertama kemudian dihitung, bila tidak ada calon dengan pilihan pertama yang memperoleh suara mayoritas, calon dengan jumlah suara yang paling kecil dihapuskan dari daftar calon, dan suara-suara dengan urutan kedua bagi calon yang dihapuskan itu dibagikan kepada calon-calon yang masih ada. Proses ini berjalan terus sampai seorang calon memperoleh mayoritas suara. Richard H. Chauvel, Politics Down Under: Kehidupan Politik dalam Negeri Australia, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol 6, 1990. hlm. 67.

khususnya mengenai masalah-masalah seperti pelaksanaan hak-hak asasi manusia, dan masalah perikemanusiaan.³

Sejak pertengahan tahun 1970an, agenda utama konflik Australia-Indonesia beralih pada masalah Timor-Timur. Baik Australia maupun Indonesia pada prinsipnya mempunyai persamaan kepentingan di Timor-Timur, yakni kepentingan akan keamanan wilayah serta kepentingan ekonomi. Australia menganut sistem demokrasi parlementer yang sangat kompetitif, debat politik yang terjadi didalam negerinya selalu terpantul pada politik luar negerinya. Kebijakan pemerintah Australia kepada Indonesia selalu berubah-ubah sesuai dengan situasi politik dalam negerinya, yang berarti juga sangat tergantung pada kebijakan partai politik yang memerintah.⁴

Hubungan antara Australia dan Indonesia sering kali mengalami pasang surut, tetapi tidak dalam keadaan kritis. Pada masa pemerintahan Soeharto, yang menjadi isu dalam hubungan diplomatik antara Australia dengan Indonesia adalah Timor-Timur (Pemberontakan Fretilin) 1974-1982. Hubungan diplomatik sepanjang 1974 antara pemerintahan Soeharto dan PM Australia, Gough Whitlam tercermin dalam sikap kooperatif Australia pada saat Timor-Timur akan diintegrasikan ke dalam wilayah Indonesia secara damai.

³ Muslim Edib, “Politik Luar Negeri Australia terhadap Indonesia : Dari Whitlam sampai Hawke”, *Journal Ilmu Politik*, No 06, 1986. hlm. 78-89.

⁴ *Ibid*, hlm. 60

Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Gough Whitlam pernah bertemu dan bebincang-bincang pada tahun 1975, di dalam pembicaraan itu dikatakan bahwa Australia telah setuju untuk mendukung Indonesia dalam mengambil kembali wilayah Timor-Timur dengan syarat integrasi Timor-Timur dengan Indonesia tersebut juga mendapat dukungan Internasional. Pada tahun 1978 Australia menjadi Negara Barat pertama dan satu-satunya yang memberi pengakuan *de facto* terhadap pengintegrasian Timor-Timur ke Indonesia melalui perdana menteri Malcolm Fraser.⁵

Perubahan sikap Malcolm Fraser terhadap masalah Timor-Timur banyak dipengaruhi oleh tekanan-tekanan AS, yang tidak menginginkan rusaknya hubungan Australia dengan Indonesia. Amerika Serikat mendesak Malcolm Fraser untuk tidak mempermasalahkan integrasi Timor-Timur ke dalam Indonesia. Disamping itu perubahan sikap Malcolm Fraser terhadap masalah Timor-Timur juga dipengaruhi oleh beberapa faktor dari dalam negerinya. Menguatnya posisi Malcolm Fraser setelah pemilihan umum 1977, membuatnya tidak perlu mempertahankan gantungan politik dari kelompok yang mempermasalahkan integrasi Timor-Timur. Demikian juga membaiknya ekonomi dalam negeri dimana inflasi dan defisit anggaran belanja berhasil ditekan semakin memperkuat kedudukan Malcolm Fraser pada pertengahan 1978.

⁵ Hilman Adil, Beberapa Segi Politik Bertetangga Baik antara Indonesia dan Australia, *Prisma*, Vol. V No. 9, 1977. hlm. 21.

Tindakan Indonesia yang melakukan pendudukan agresif di Timor-Timur dikritik publik Australia dan akhirnya pemerintah Australia juga mengkritiknya kembali di PBB. Kritik ini diyakini muncul akibat aksi invasi Indonesia terhadap Timor-Timur yang mengakibatkan lima wartawan Australia tewas dalam peristiwa Balibo pada tahun 1975. Sejak saat itu, pers Australia banyak melakukan pemberitaan yang konfrontatif dan kritis terhadap Indonesia.

Pada saat Australia di bawah Perdana Menteri Malcolm Fraser pada tahun 1976, Indonesia masih sering mendapat kritikan tajam dari Australia, antara lain Malcolm Fraser dan James Dunn, mantan konsul Australia di Timor-Timur mulai meninggalkan masalah Timor-Timur. Pada saat inilah masalah Timor-Timur tidak dibahas lagi oleh pemerintahan Australia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Siapakah Malcolm Fraser ?
2. Bagaimana hubungan Australia dengan Indonesia Sebelum masa pemerintahan Malcolm Fraser ?
3. Bagaimanakah kebijakan Australia terhadap Indonesia pada saat Malcolm Fraser?
4. Masalah-masalah apa yang mempengaruhi hubungan antara Australia dengan Indonesia pada masa Malcolm Fraser ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

- a. Melatih daya pikir yang kritis, analitis, sistematis, dan objektif serta peka terhadap fenomena yang terjadi dimasa lampau.
- b. Mengembangkan serta menambah karya penulisan ilmiah, terutama dalam bidang penulisan sejarah Australia.
- c. Meningkatkan kepekaan terhadap peristiwa pada masa lampau untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam melangkah ke masa depan dengan landasan pemahaman isi dan nilai yang terkandung dalam setiap peristiwa sejarah.
- d. Sebagai salah satu untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta.

2. Tujuan khusus

- a. Mengetahui Profil Perdana Menteri Malcolm Fraser.
- b. Mengetahui hubungan Australia dengan Indonesia sebelum Malcolm Fraser .
- c. Mengetahui kebijakan Australia terhadap Indonesia pada masa Malcolm Fraser
- d. Mengetahui Masalah-masalah yang mempengaruhi hubungan antara Australia dengan Indonesia pada masa Malcolm Fraser.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pembaca

- a. Memberikan tambahan pengetahuan kepada pembaca mengenai siapa itu Malcolm Fraser dan apa saja yang dilakukannya dalam kerjasamanya dengan Indonesia;
- b. Memperluas wawasan kesejahteraan terutama yang terkait dengan sejarah Australia khususnya Sejarah Hubungan Australia dengan Indonesia;
- c. Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian-penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Bagi Penulis

- a. Sebagai tolok ukur akan kemampuan penulis dalam menganalisis dan merekonstruksi peristiwa sejarah.
- b. Guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta.
- c. Sebagai sarana untuk memperkaya pengetahuan sejarah di Australia, terutama mengenai benua Australia sendiri dan Dinamika hubungan Australia pada masa Perdana Menteri Malcolm Fraser.

E. Kajian Pustaka

Malcolm Fraser dilahirkan 21 mei 1930, dari keluarga petani dan peternak domba yang kaya , sebelum menjadi perdana menteri Malcolm Fraser merupakan pemimpin dari partai Liberal. Perjalanan Malcolm Fraser kedalam dunia politik banyak mengalami hambata-hambatan akan tetapi Malcolm Fraser ini tidak membuat dirinya putus asa karena sejak kecil Malcolm Fraser berniat untuk terjun ke dunia politik. Dalam pembahasan profil Malcolm Fraser ini penulis tidak menggunakan buku, tetapi penulis hanya menggunakan surat kabar yakni Kompas 20 Desember 1975 dan surat kabar Tempo 9 Oktober 1976. Malcolm Fraser lahir pada tanggal 21 Mei 1930 di daerah Wannon, Australia, anak kedua dari 2 bersaudara, kakak perempuannya bernama Lorainne.⁶ Sir Simon Fraser kakeknya Malcolm Fraser adalah salah satu yang pertama dipilih sebagai senator mewakili Negara bagian Victoria. Malcolm Fraser menempuh pendidikan terakhirnya di Universtas Oxford di Inggris, Selama jadi mahasiswa di Oxford, Fraser selalu mengelak kalau ada malam diskusi. Pada saat Malcolm Fraser berumur 22 tahun, Malcolm Fraser pernah mengirimkan surat pada ibunya mengatakan bahwa dia ingin terjun didunia politik, tetapi ibunya tidak yakin karena dia mengetahui bagaiman sifat dan kepribadian Fraser, pemalu dan pendiam. Setelah lulus

⁶ *Malcolm Fraser, Perdana Menteri Australia.* Dalam *Kompas*, Sabtu 20 Desember 1975, Hlm. 6.

Malcolm Fraser kembali ke Wannon tanah kelahirannya. Di Wannon Malcolm Fraser menempuh hidupnya sebagai peternak domba yang kaya, tetapi itu berlangsung tidak lama, Malcolm Fraser ikut mencoba mencalonkan diri sebagai wakil rakyat dari Wannon pada tahun 1954, akan tetapi dia gagal. Kegagalan Malcolm Fraser untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat ternyata tidak membuat dia putus asa, di tahun 1955 Malcolm Fraser kembali mencalonkan diri hingga akhirnya dia memenangkan pemilu tersebut. Malcolm Fraser menikah dan dikaruniai tiga orang anak.

Malcolm Fraser terpilih menjadi Perdana Menteri Australia pada tanggal 11 November 1975, menggantikan Gough Whitlam yang dipecat langsung oleh Jendral Sir John Kerr, karena krisis politik di Australia. Perubahan, pembaharuan, idealisme, bukan sosialisme adalah semboyan yang dipakai Malcolm Fraser selama kampanye pemilihan umum.⁷

Dalam pembahasan hubungan Australia-Indonesia sebelum Malcolm Fraser yakni pada masa Gough Whitlam penulis menggunakan buku “*Hubungan Australia dengan Indonesia : Faktor Geografi, Politik dan Strategi Keamanan*”, karangan Sugiarti Sriwibawa, tahun 1995, penerbit Universitas Indonesia, Jakarta. Buku ini menjelaskan tentang, pada era pemerintahan Gough Whitlam hubungan Australia-Indonesia sangat baik terlebih pada saat Indonesia dibawah presiden Soeharto lebih banyak memusatkan diri pada pembangunan ekonomi dari pada pembangunan

⁷ Kompas, *op.cit.*, hlm 6.

kemampuan militernya. Lebih dari pada itu, Australia sendiri mempunyai kemampuan militer dan teknologi yang relative lebih dari cukup untuk melakukan preemptive terhadap Indonesia. karena itu Gough Whitlam tidak ada halangan untuk menjalin hubungan baik dengan Indonesia.

Dalam masalah Timor-Timur Gough Whitlam tidak memiliki perbedaan mendasar dengan Soeharto. Integrasi wilayah tersebut kedalam wilayah Indonesia dilihatnya sebagai pilihan yang paling realitis. Bagi Gough Whitlam, ketidakpastian yang terjadi dalam wilayah tersebut nanti tidak hanya membahayakan kepentingan Indonesia atau Australia saja, tetapi lebih jauh lagi membahayakan stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Penulis juga menggunakan buku karangan Dewi Fortuna Anwar, yang berjudul *Implementasi Kebanyakan Luar Negeri dan Pertahanan Australia Terhadap Indonesia, Studi Kasus Timor-Timur (1966-2000)* yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI Jakarta, Tahun 2001. Dalam buku ini dibahas tentang Bentuk-bentuk Hubungan Australia dengan Indonesia antara lain dalam Bidang Ekonomi dimana pada tahun 1977-1978 ekspor Australia ke Indonesia berjumlah 196.000 juta dolar Australia, sedangkan impor Australia hanya 84.000 juta dolar Australia, Dalam Bidang sosial. Indonesia merupakan negara penerima bantuan nomor dua terbesar dari Australia, Sedangkan pada Bidang pendidikan, Australia memperkenalkan pelajaran bahasa Indonesia yang diperkenalkan pada sekolah menengah atas.

Selain itu Australia memiliki studi, studi yang mantap dan bergava, tentang Asia Tenggara di berbagai perguruan tinggi seperti Monash University di Melbourne.

Buku yang berjudul *“Indonesia dan Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral*, yang ditulis oleh Chusnul Mariyah diterbitkan oleh Granit, Jakarta pada tahun 2005. Buku ini dapat menjadi acuan dalam memahami hubungan Politik Luar Negeri diantara keduanya.

Australia pada masa pemerintahan Malcolm Fraser telah mengakui dan membela kedaulatan Indonesia atas Timor-Timur dengan resiko biaya domestik dan cemohan internasional atas keputusannya. Pemerintah Australia telah mencoba meski tidak berhasil, untuk menyembunyikan hubungannya dengan Jakarta dari kontroversi domestik dan internasional seputar masalah Timor-Timur. Bersatunya Timor-Timur dengan Indonesia merupakan prioritas pilihan strategis pemerintahan Canberra sejak awal 1960an.

Malcolm Fraser menjadi Perdana Menteri Australia menggantikan Gough Whitlam yang dipecat oleh Gubernur Jenderal Sir John Kerr pada bulan November tahun 1975. Pola politik luar negeri Malcolm Fraser banyak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada tata perimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Hubungan Australia dengan Indonesia sebelum kemerdekaan Timor-Timur juga ditandai dinamika pasang surut. Kebanyakan pasang surut terjadi dalam secara politik. Sebelum Perang Dunia II hubungan antara Australia dan

Hindia Belanda (nama jajahan untuk Indonesia) bercirikan saling pengabaian dan ketidaktahuan. Waktu Jepang menyerbu Hindia Belanda dalam PDII Australia megakui pentingnya Indonesia untuk keamanan Australia.⁸

Buku yang berjudul “*Ikhtisar Hubungan-Hubungan Australia Indonesia*”, yang disusun oleh kantor Penerangan, Kedutaan Besar Australia, Jakarta. Buku ini dapat dijadikan salah satu literature, tulisan ini memberi gambaran umum tentang hubungan-hubungan Australia dengan Indonesia baik dalam bidang diplomatik maupun dalam bidang Pertahanan.

Setiap hubungan antar negara banyak komponen-komponen sebuah kerjasama diantaranya kerjasama dalam bidang politik, militer, diplomatik, ekonomik dan sosial-budaya. Sebagian ini difokuskan tiga komponen; politik yang termasuk diplomatik dan militer, ekonomi dan sosial-budaya. Pada umumnya, kebijakan luar negeri Australia dan kebijakan luar negeri Indonesia memang tidak cocok karena kedua negara ini mempunyai kepentingan yang berbeda.

Hubungan Australia dengan Indonesia tidak akan terjalin apabila tidak ada sebab-sebabnya, adapun masalah-masalah yang dapat mempengaruhi hubungan keduanya antaralain yakni, Revolusi Anyelir, Hilangnya wartawan Australia di Balibo, Integrasi Timor-Timur kedalam Wilayah NKRI, dan Insiden Dili. Revolusi Anyelir terjadi pada tanggal 24 April 1974, revolusi ini terjadi pada saat pemerintah

⁸ George Margaret, *Australian and The Indonesian Revolution*. Jakarta : Pantja Simpati, 1986, hlm. 25.

Caetano di jatuhkan. Sedangkan Integrasi Timor-Timur terjadi pada saat dibacakannya Deklarasi Balibo, dan di akui secara *de facto* oleh Perdana Menteri Malcolm Fraser tahun 1975.

F. Historiografi yang Relevan

Penyajian suatu rekonstruksi peristiwa masa lampau memerlukan sumber sebagai modal dasar terciptanya karya tulis. Historiografi yang relevan merupakan hal yang pokok diantara tugas-tugas yang lain yang harus dikerjakan sebelum penulisan sejarah. Secara *harfiah* historiografi berarti pelukisan sejarah, gambaran tentang peristiwa yang terjadi pada waktu yang lampau.⁹

Historiografi adalah rekonstruksi sejarah melalui proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman masa lampau. Menurut Louis Gottschalk, historiografi adalah rekonstruksi imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses menguji dan menganalisis secara kritis semua rekaman dan peninggalan masa lampau.¹⁰

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan skripsi yang ditulis oleh Warjo dengan judul *Analisis Hubungan Australia Indonesia (1945-1992)* dari Jurusan Pendidikan Sejarah FISE Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam skripsi ini diperoleh informasi bahwa pasang surut hubungan yang terjalin

⁹ Helius Sjamsuddin, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Depdikbud, 1996, hlm.16.

¹⁰ Louis Gottschalk, "Understanding History : A Primer of Historical Method", a.b, Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1975, hlm.35.

antara Australia dengan Indonesia dari tahun 1945-1992 serta upaya-upaya yang ditempuh untuk memperbaiki hubungan diantara keduanya. Australia dan Indonesia sudah lama menjalin hubungan sebelum Inggris meletakkan kakinya di Australia.

Penulis juga menggunakan skripsi yang ditulis oleh Irvan Dwi Rohmawan yang berjudul *Kebijakan Politik Australia : Analisis Terhadap Peranan Australia dalam Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia (1945-1949)*. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2010. Dalam skripsi dapat diperoleh informasi bahwa kebijakan politik luar negeri Australia dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yakni mengakui integritas territorial Hindia Belanda, dan semua pembicaraan antara Hindia Belanda dilakukan atas dasar keuntungan timbal balik. Pembicaraan pada pertemuan-pertemuan tersebut mengungkapkan tujuan Australia untuk menghasilkan suatu persetujuan resmi (sesuai dengan garis kebijakan pakta ANZAC) yang menutupi kembalinya pemerintahan Hindia Belanda di Australia.

Tulisan-tulisan yang ada sebelumnya ini sangat berguna sebagai pendukung skripsi ataupun menjadi sumber yang saling melengkapi, namun tulisan-tulisan tersebut masing-masing memiliki perbedaan dengan skripsi yang berjudul Hubungan Australia-Indonesia pada masa Malcolm Fraser karena skripsi-skripsi yang sebelumnya hanya menuliskan pokok-pokok materi tertentu, tidak membahas satu paket secara utuh tentang skripsi yang berjudul Hubungan Australia-Indonesia pada masa Malcolm Fraser Tahun 1975-1983.

G. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Sejarah merupakan ilmu yang mempelajari ruang dan waktu. Peristiwa dimasa lalu merupakan hal terpenting, karena dapat digunakan sebagai bahan pelajaran yang berharga untuk kita dimasa yang akan datang. Sejarah tidak hanya mempelajari peristiwa dimasa lalu, tetapi mempelajari sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, sebuah peristiwa bersejarah sangat penting bagi manusia untuk diungkap kembali dan dituangkan dalam bentuk karya sejarah.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan empat tahap untuk merekonstruksi suatu peristiwa sejarah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nugroho Notosusanto, metode sejarah mempunyai empat langkah kegiatan, yaitu *Heuristik*, Kritik Sumber (verifikasi), Interpretasi dan Historiografi¹¹.

a. Heuristik

Heuristik berasal dari kata *Heuriskein* yang berarti memperoleh atau menemukan. Pada tahap ini penulis harus melakukan pengumpulan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan judul. Heuristik diperoleh dari sumber primer dan sekunder.¹²

¹¹ Nugroho Notosusanto, *Norma-norma Dasar Penelitian Penulisan Sejarah*. Jakarta : Dephankam, 1971, hlm.35.

¹² I Gde Widja. *Sejarah Lokal Suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta, 1989, hlm.18.

penulis berusaha mencari sumber-sumber yang relevan sebagai bahan kajian untuk menyusun skripsi ini. Heuristik (pengumpulan data) merupakan kegiatan untuk menemukan sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, seperti; buku, jurnal, majalah, koran dan foto-foto. Untuk menjadikan historiografi, perlu dicari sumber-sumbernya (bukti-bukti), baik sumber primer, sekunder, tersier maupun historis.

Sumber Sejarah menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dan sekunder yang digunakan dalam penulisan ini berupa buku-buku, dokumen dimana buku tersebut ditulis oleh orang yang menyaksikan peristiwa tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Sumber Primer, menurut Louis Gottschalk, sumber primer adalah kesaksian dari seseorang saksi mata dengan mata kepalanya sendiri. Selain itu juga kesaksian menggunakan panca indera yang lain atau juga saksi dengan alai mekanis yang selanjutnya disebut saksi pandang mata. Arti lain sumber primer adalah sumber yang disampaikan oleh saksi mata. Disini penulis tidak menggunakan sumber primer karena keterbatasan sumber.

Sumber sekunder, sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandang mata, yakni dari seorang yang tidak hadir dalam peristiwa yang dikisahkan.¹³ Menurut Winarno Surahmad sendiri mengatakan bahwa sumber sekunder adalah sumber yang mengutip sumber lain. Jadi dikatakan bahwa sumber sekunder adalah sumber yang berasal dari orang kedua.

Sumber sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

Azwar Dzalil. (1997). *Proyek Kerjasama Keamanan Indonesia Australia dalam rangka Memantapkan Stabilitas Regional*. Jakarta: Lemhanas

Chusnul Mariyah. (2005). *Indonesia-Australia : Tantangan dan Kesempatan dalam hubungan Politik Bilateral*. Jakarta: Granit.

Dafri. (1997). *Hubungan Indonesia-Australia, Kendala dan Propeknya*. Laporan Penelitian Tidak Di Terbitkan.UGM.

Leo Suryadinata. (1998). *Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Soeharto: Hubungan Indonesia dengan Australia dan Papua New Guinea*. Jakarta: LP3S.

Gregor Neonbasu P. (1997). *Peta Politik dan Dinamika Pembangunan Timor-Timur*. Jakarta : Yanense Mitra Sejat.

¹³ *Ibid.*

b. Kritik Sumber

Kritik sumber dilakukan sebagai upaya untuk menentukan apakah sumber atau data yang didapat valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya baik secara substansial maupun secara fisik.¹⁴ Kritik sumber terdiri dari kritik ekstern (*otentisitas*) dan kritik intern (*kredibilitas*).¹⁵ Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui dokumen itu otentik apa tidak jika dilihat dari segi bentuk, bahan, tulisan dan sebagainya. Sedangkan kritik intern dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan persoalan apakah isi sumber dapat dipercaya atau tidak.

Dalam kegiatan kritik sumber, penulis berusaha mencari sumber-sumber yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Pada tahap ini penulis juga melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang telah didapat. Tujuan kritik sumber adalah untuk memberikan penelitian terhadap validitas dan reliabilitas sumber yang dilakukan dengan cara membandingkan sumber-sumber yang terkumpul. Kritik sumber sendiri berarti usaha untuk menilai, menguji, serta menyeleksi sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan sumber yang autentik (asli). Kritik sumber terdiri atas kritik intern dan kritik ekstern.

¹⁴ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 2001, hlm.99.

¹⁵ Helius Sjamsuddin, *op. cit.*, hlm. 132

1). Kritik intern

Kritik Intern adalah kritik sumber yang digunakan untuk meneliti kebenaran isi dokumen atau tulisan tersebut. Sedangkan kritik ekstern adalah kritik sumber yang digunakan untuk mengetahui keaslian sumber yang digunakan untuk mengetahui keaslian sumber yang digunakan dalam penulisan.

Contoh kritik sumber khususnya kritik Intern yang digunakan dalam skripsi yang berjudul “Hubungan Australia-Indonesia Pada Masa Malcolm Fraser Tahun 1975-1983” adalah buku yang disusun oleh kantor penerangan, kedutaan besar Australia yang berjudul “Ikhtisar Hubungan-Hubungan Australia-Indonesia”, sebagai pembanding, penulis juga melakukan kritik intern terhadap surat kabar tempo, 9 Oktober 1976 yang berjudul “Apa yang Bisa (dan Tidak Bisa) Dilakukan Malcolm Fraser”. Dari buku yang disusun oleh kantor penerangan kedutaan besar Australia dengan surat kabar tempo terdapat kesamaan informasi hubungan Australia-Indonesia pada saat Malcolm Fraser menjabat sebagai Perdana Menteri.

2). Kritik Ektern

Kritik eksern merupakan kritik yang dilakukan untuk menguji keaslian sumber. Kritik ekstern dilakukan dengan melihat aspek-aspek ekstrinsik dari sumber. Kritik ekstern sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa peneliti sejarah menggunakan sumber asli dan bukan rekayasa.

Kritik ekstern dapat dilakukan dengan melihat apakah sumber tersebut sesuai dengan kebutuhan, merupakan sumber asli atau salinan, dan apakah terjadi penambahan atau perubahan pada sumber-sumber tersebut.

c. Analisis Sumber (Interpretasi)

Interpretasi adalah menafsirkan fakta-fakta yang telah diuji kebenarannya, kemudian menganalisa sumber yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu rangkaian peristiwa. Menurut I Gde Widja, dalam melakukan interpretasi bahwa rangkaian fakta-fakta itu harus menunjukkan sebagai suatu rangkaian "bermakna". Dalam tahap ini penulis dituntut untuk mencermati dan mengungkapkan data-data yang diperoleh. Dalam interpretasi perlu dilakukan analisis sumber untuk mengurangi unsur subyektivitas dalam kajian sejarah, karena unsur subyektivitas dalam suatu penulisan sejarah selalu ada yang dipengaruhi oleh jiwa, zaman, kebudayaan, pendidikan, lingkungan sosial, dan agama yang melingkupi penulisannya.¹⁶

Analisis sumber perlu dilakukan dengan menjelaskan data-data yang ada atau menguraikan informasi dan mengaitkannya antara satu sumber dengan sumber lainnya.¹⁷ Contoh analisis sumber-sumber dari penulisan skripsi ini adalah setelah memenangkan pemilu Bulan Oktober tahun 1977, Fraser pun mencanangkan

¹⁶ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm.100-110

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 22

kembali pemilu yang jatuh di bulan Desember tahun 1977. Diadakannya pemilu tersebut membuat pihak oposisi yang dipimpin mantan Perdana Menteri Gough Whitlam ini menentang Fraser mengadakan kampanye besar-besaran.

d. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Historiografi merupakan sebuah kegiatan menyusun fakta-fakta menjadi sejarah, setelah melakukan pencarian sumber, penilaian sumber, penafsiran kemudian dituangkan menjadi suatu kisah sejarah dalam bentuk tulisan. Aspek kronologis sangat penting dalam penulisan sejarah karena dapat mengetahui perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam suatu peristiwa sejarah.

Menulis sejarah merupakan suatu kegiatan intelektual dan hal tersebut merupakan cara yang utama untuk memahami sejarah. Ketika sejarawan memasuki tahap menulis, maka sejarawan akan mengerahkan seluruh daya pikirannya, bukan saja keterampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan dan catatan-catatan, tetapi hal yang terutama adalah penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisinya karena sejarawan pada akhirnya harus menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitiannya dalam suatu penulisan utuh.¹⁸

¹⁸ Helius Sjamsuddin, *op.cit.*, hlm.153.

2. Pendekatan Penelitian

Segi peninjauan pendekatan dalam skripsi ini difokuskan pada pendekatan sosiologis, politik dan ekonomi. Menurut Sartono Kartodirdjo pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk meneropong segi-segi sosial berkaitan dengan peristiwa yang dikaji, misalnya golongan sosial yang berperan, nilai-nilai yang berlaku, hubungan dengan golongan lain, konflik berdasarkan kepentingan, ideologi, dan lainnya.¹⁹

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yakni ekonomi, politik, dan sosiologis. Pendekatan ekonomi merupakan pendekatan yang dilakukan untuk melihat bagaimana manusia dan masyarakat melakukan berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya. Aktivitas ini meliputi aktivitas pemanfaatan sumber daya dan pemberian nilai tambah pada barang kemudian mendistribusikannya sehingga dapat dikonsumsi. Pendekatan ekonomi dalam penulisan sejarah diperlukan untuk memahami proses-proses kegiatan ekonomi dan adanya motif ekonomi di balik suatu tindakan dan peristiwa. Penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi untuk memahami aktivitas dan motif ekonomi yang mempengaruhi kebijakan politik Australia terhadap Indonesia dibawah kepemimpinan Malcolm Fraser, dan perkembangan-perkembangan ekonomi Australia pada saat pemerintahan Malcolm Fraser.

¹⁹ Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982, hlm.71.

Menurut Sartono Kartodirdjo bahwa pendekatan politik dimaksudkan untuk menyoroti struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, hirarkhi sosial, pertentangan kekuasaan dan sebagainya.²⁰ Pendekatan politik dalam skripsi ini ditujukan untuk memahami latar belakang politik yang mempengaruhi kebijakan pemerintahan Australia dalam menyelesaikan masalah-masalah Timor-Timur.

Pendekatan sosiologis dalam skripsi ini dimaksudkan untuk menggambarkan peristiwa masa lalu yang didalamnya mengandung segi-segi sosial dari peristiwa yang dikaji. Pembahasannya mencakup golongan sosial yang berperan, jenis hubungan sosial, konflik berdasarkan kepentingan. Pendekatan ini berperan untuk menjelaskan kondisi sosial di masyarakat Australia saat dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Malcolm Fraser.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai skripsi ini, maka penulis akan memberikan gambaran secara ringkas. Skripsi yang berjudul “Dinamika Hubungan Australia-Indonesia Pada Masa Malcolm Fraser Tahun 1975-1983 ini memiliki Sistematika pembahasan sebagai berikut :

²⁰ *Ibid.*, hlm. 63.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, historiografi yang relevan, metode dan pendekatan penelitian serta Sistematika pembahasan.

BAB II SEJARAH SINGKAT TENTANG MALCOLM FRASER

Pada bab ini dibahas mengenai Malcolm Fraser, seperti kehidupan keluarganya, latar belakang pendidikan, kemudian seputar pemilu yang menjadikannya sebagai Perdana Menteri, serta kehidupan politiknya yakni dalam partai Liberal, hingga Malcolm Fraser keluar dari partai Liberal.

BAB III HUBUNGAN AUSTRALIA-INDONESIA SEBELUM PEMERINTAHAN MALCOLM FRASER

Dalam bab ini akan dibahas, tentang bagaimana hubungan Australia-Indonesia sebelum Malcolm Fraser. Peranan Perdana Menteri Australia sebelum Malcolm Fraser yakni pada saat Gough Whitlam, dalam menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia yang dinilai sangat akomodatif dan kooperatif.

BAB IV KEBIJAKAN AUSTRALIA TERHADAP INDONESIA PADA MASA MALCOLM FRASER

Dalam bab ini membahas tentang kebijakan-kebijakan dari Australia terhadap pemerintahan di Indonesia, baik dalam bidang ekonomi, bidang social, dan bidang pendidikan.

BAB V MASALAH YANG MEMPENGARUHI HUBUNGAN AUSTRALIA-INDONESIA PADA MASA MALCOL FRASER

Pada bab ini akan dibahas mengenai, hubungan Australia dengan Indonesia pada saat Malcolm Fraser memerintah sebagai perdana menteri Australia, dimana Australia terlibat langsung dalam permasalahan-permasalahan di Timor-Timur dan akan dibahas juga seperti apa penyelesaiannya.

BAB VI KESIMPULAN

Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta isi dari semua pokok pembahasan penulisan skripsi yang berjudul "Hubungan Australia- Indonesia Pada Masa Malcolm Fraser Tahun 1975-1983".

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN